

TAJUK RENCANA

Menguji Integritas Dewas KPK

KONTROVERSI seputar perjalanan Ketua KPK Firi Bahuri yang menggunakan helikopter mewah di Sumatera Selatan (Sumsel) belum usai. Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah meminta keterangan yang bersangkutan, namun hasilnya belum diumumkan ke publik. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menerima penjelasan dari Firi bahwa penggunaan heli tersebut untuk kepentingan efisiensi waktu, karena ia cuti hanya selama satu hari (KR 27/6).

Andai semua pejabat berhalasan yang sama, yakni menggunakan helikopter mewah untuk efisien waktu, guna membenarkan tindakannya, bisa dibayangkan betapa persoalan etika tak lagi dianggap penting. Hanya karena memiliki uang, atau ada anggaran, tentu tak serta merta boleh menggunakannya untuk segala hal, apalagi yang berkesan mewah. Apalagi, di tengah situasi krisis saat pandemi Covid-19, masyarakat akan mudah menilai bahwa pejabat tidak peka terhadap situasi masyarakat yang sedang prihatin.

Kita sebenarnya tidak terlalu kaget dengan tindakan Ketua KPK yang menggunakan helikopter mewah saat kunjungan ke Baturaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Sejumlah aktivis antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah lama meragukan kredibilitas Firi dalam memimpin KPK. Apalagi, berdasar evaluasi selama enam bulan terakhir, tidak terjadi kemajuan, bahkan kemunduran dalam pemberantasan korupsi.

Laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas tindakan Firi yang dinilai melanggar kode etik pimpinan KPK memang selayaknya direpons cepat agar tidak menjadi isu

liar. Menggunakan helikopter mewah untuk suatu perjalanan memang menjadi fenomena aneh bagi pimpinan KPK, bahkan hal itu mengarah kehidupan mewah. Padahal, jelas, untuk jajan pimpinan KPK, bermain golf saja dilarang karena memperlihatkan kehidupan hedonis.

Kiranya dengan adanya laporan resmi dari MAKI, Dewas KPK yang notabene anggotanya terdiri atas orang-orang yang kredibel dan teruji integritasnya, mampu bertindak objektif dan profesional. Kasus ini sekaligus juga menjadi ujian bagi integritas anggota Dewas KPK untuk bersikap independen dan tidak mempan intervensi pihak manapun.

Hemat kita, persoalan etika tak kalah penting dengan persoalan hukum, apalagi ini menyangkut pejabat negara yang menentukan arah penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Tentu kita menginginkan pucuk pimpinan di lembaga antirasuah ini bekerja profesional dengan menjunjung tinggi etika profesi.

Alasan menggunakan helikopter untuk efisien waktu dan membayar, tentu tak bisa serta merta urusan selesai. Dewas perlu mengklarifikasi, misalnya dari mana Firi menyewa heli tersebut, juga apakah ada kaitan dengan kasus yang sedang ditangani, dan sebagainya. Jadi, urusannya tentu bukan soal membayar atau tidak membayar, tapi juga menyangkut ada tidaknya keterkaitan kasus.

Karena ini sudah menjadi isu publik, kita mengharap Dewas KPK transparan menangani persoalan Firi. Kita percayakan sepenuhnya kepada Dewas KPK untuk menyimpulkan apakah tindakan Firi yang menggunakan helikopter mewah melanggar kode etik atau tidak. □

Kongres Kebudayaan Desa, Mengeja Ulang Indonesia

Ryan Sugiarto

disi ekonomi, sosial dan kesehatan dari hari ke hari melalui *handphone*.

Data ini kemudian diolah pemdes untuk memetakan kondisi, kebutuhan dan keselamatan warga terpenuhi selama pandemi. Desa Panggungharjo pun tak lagi kesulitan untuk meng-update daftar warga yang berhak mendapatkan bantuan.



KR-JOKO SANTOSO

COVID-19 telah melumpuhkan berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat. Segala aktivitas sosial masyarakat dibatasi. Data terakhir per tanggal 27 Juni 2020 terdapat 52.812 kasus Covid-19 dengan peningkatan angka per harinya lebih dari 1.000 kasus.

Selama pandemi Covid-19 terjadi, desa-desa diseluruh Nusantara melakukan berbagai cara untuk mengurangi risiko penyebaran virus Korona. Covid-19 mengingatkan kembali memori desa-desa di Jawa dengan istilah *pageblug*. *Pageblug* diartikan sebagai datangnya virus yang menjangkiti banyak orang dalam waktu cepat. Untuk menolak *pageblug*, warga desa menggunakan ruwatan untuk menolak segala ancaman dengan tolak bala melalui serangkaian doa dan upacara. Khusus pada *pageblug* Covid-19, desa harus mengubah strategi berperang, bukan hanya dengan ritual tolak bala, tapi dengan siasat kebudayaan.

Covid-19 mendekonstruksi seluruh tatanan sosial, ekonomi dan politik tanpa teriak revolusi. Pertanyaan yang terlintas, kapankah pandemi ini berakhir? Bagaimana gambaran hidup di era *new normal* dan sesudahnya?

Desa Panggungharjo

Fakta bahwa pandemic ini tak bisa diprediksi membuat Desa Panggungharjo di Bantul membuat gugus tugas tingkat desa dengan nama Panggungharjo Covid-19 (PTC-19). PTC-19 dibawah komando pemdes berupaya melakukan mitigasi kesehatan, ekonomi dan sosial warga. Mitigasi *pageblug* tak lagi menggunakan ritual yang mengumpulkan banyak orang tapi dengan menggunakan data berbasis teknologi.

Mitigasi ditingkatkan desa dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi (*handphone*) untuk memetakan potensi dan risiko kesehatan, ekonomi dan sosial setiap warga. Warga diajak berperan aktif dengan mengisi *form* kon-

Kongres Kebudayaan

Ikhtiar untuk penanganan Covid-19 memiliki tantangan pasakondisi darurat yaitu belum siapnya siasat kebudayaan untuk membuat tatanan baru. Selama ini di era *new normal* warga hanya mendapatkan imbauan penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Belum ada siasat-siasat kebudayaan untuk mengelak manusia dari kepunahan, mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi.

Covid-19 bisa menjadi momentum bersiasat kebudayaan untuk membuat tatanan baru Indonesia. Upaya bersiasat ini dilakukan Desa Panggungharjo dengan menyelenggarakan Kongres Kebudayaan

dayaan Desa bersama warga desa, akademisi, praktisi, berbagai komunitas. Kongres ini merupakan ikhtiar mengelaborasi gagasan untuk mendefinisikan dan mendudukkan tatanan baru Indonesia dari desa. Dimana desa menyusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat yang dimulai dari desa.

Hipotesis yang ingin diuji dari kongres ini adalah puncak relasi sosial adalah gotong royong, puncak relasi ekonomi adalah kerja sama dan puncak relasi politik adalah musyawarah. Tiga hal yang selama ini dihidupi oleh warga desa dan ingin disumbangkan semangatnya kepada Indonesia melalui berbagai tema-tema yang dibahas didalam Kongres Kebudayaan Desa.

Rangkaian perumusan tatanan baru dari desa melalui kondisi, situasi dan imajinasi warga desa dalam menghadapi Covid-19. Serial 19 web binar (1-10 Juli 2020), festival 19 subkultur (13-16 Juli 2020), perumusan panduan RPJMDes yang digunakan sebagai acuan bagi desa-desa diseluruh Indonesia dalam merevisi RPJMDes dengan memasukkan berbagai variabel saat dan pascapandemi. Terakhir adalah Deklarasi Kongres Kebudayaan Desa : Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A : Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa tanggal 15 Agustus 2020 melalui kongreskebudayaan desa. □

*) **Ryan Sugiarto MA**, Ketua Kongres Kebudayaan Desa, Dosen Psikologi Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.

Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke opinikr@gmail.com dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terimakasih

Pikiran Pembaca



Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Kolaborasi Pembangunan Internasional

TUJUAN Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai implementasi dari Agenda 2030 di tahun 2020 baru menginjak tahun kelima di saat pandemi Covid-19 menyerang lebih dari 150 negara di dunia. Mau tidak mau di tahun ini setiap negara di belahan dunia lebih memprioritaskan agenda utamanya untuk menangani dampak penyebaran Covid-19. Setiap negara menjadi sangat *state centric* serta lebih memanfaatkan segala sumber keuangan dan kapasitas teknik operasional dilakukan oleh setiap negara guna menyelamatkan warga yang terkena Covid-19.

Pada kenyataannya ketika para pemimpin dunia telah menyepakati Agenda 2030 pada SDGs, tidak terlintas di pikiran mereka untuk memperhitungkan adanya pandemi yang akan mengguncang dunia. Bahkan tidak ada negara satupun yang bisa memprediksi secara akurat kapan negara akan memberhentikan dampak penyebaran Covid-19, mengingat vaksinpun belum ditemukan. Gambaran seperti ini tentunya akan menjadi kabar buruk untuk negara-negara yang selama ini bergantung pada bantuan internasional guna mewujudkan prinsip *no one left behind* sebagai cita-cita para pemimpin dunia pada tahun 2030.

IMF sudah memprediksi bahwa pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 3% di tahun 2020. Oleh sebab itu ada beberapa skema yang bisa terjadi pada kolaborasi pembangunan internasional pasca Covid-19 dalam mewujudkan SDGs. Biasanya untuk mewujudkan SDGs ini organisasi internasional seperti World Bank, UNDP, World Food Program dan negara-negara maju akan mendukung

implementasi agenda 2030 SGDs.

Skema tersebut yang pertama, karena Covid-19 bisa menyebabkan resesi ekonomi yang lebih buruk, di sini publik akan lebih memberikan perhatian pada resesi ekonomi sebagai isu prioritas di negara-negara donor tradisional. OECD sebagai organisasi internasional yang fokus pada pembangunan ekonomi sudah mendeklarasikan komitmennya untuk mengamankan anggarannya untuk ODA sekalipun negaranya terdampak Covid-19. Apabila skema ini terjadi maka wajah kolaborasi pembangunan internasional tetap mengikuti prinsip kolaborasi negara maju dan berkembang, bedanya lebih mengemukakan sebuah keimanan.

Skema kedua yaitu hadirnya negara-negara emerging donor yang lebih berperan dalam ketidapastian global. Bergesernya wajah kolaborasi pembangunan internasional ini muncul ketika negara emerging donor membantu negara tradisional untuk menangani Covid-19. Seperti yang dilakukan oleh Negara China yang membantu Italia yang mengalami keteteran dalam menangani dampak Covid-19. Munculnya negara-negara emerging donor ini diharapkan bisa memainkan peran yang sinergi untuk membantu negara berkembang lain guna mewujudkan SDGs.

Pentingnya penguatan kolaborasi di semua negara di dunia, baik maju maupun berkembang menjadi alternatif pemecahan masalah untuk membantu negara berkembang untuk mewujudkan SDGs. Alternatif pemecahan masalah tersebut bisa terwujud apabila Covid-19 tidak memicu adanya resesi ekonomi yang memburuk pada negara donor tradisional dan negara emerging donor. □

Evania Putri Febiana,
Administrasi Publik UNY.

Jogja Kembali dan Harganas

A Kardiayat Wiharyanto

TANGGAL 29 Juni 1949, tepat 71 tahun yang lalu, terjadi peristiwa penting bagi Bangsa Indonesia, yakni kembalinya ibukota RI Yogyakarta ke tangan RI. Peristiwa ini tiap tahun kita peringati. Peringatan 29 Juni, bukan hanya memperingati kembalinya ibukota RI Yogyakarta ke tangan RI, tetapi juga sebagai peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas). Sejuah mana hubungan Jogja Kembali dengan Harganas?

Dalam sejarah, Yogyakarta tercatat sebagai kota revolusi atau kota perjuangan. Sejak proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 1945, tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII, menyatakan berdiri di belakang pemerintah RI. Di samping itu, kota Yogyakarta punya potensi nasionalisme untuk menjaga dan menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. Kota tersebut sarat dengan akar budaya yang kuat untuk mengembalikan semangat kebangsaan yang retak, terkoyak, bahkan terancam.

Sri Sultan HB IX

Sewaktu ibukota RI masih berada di Jakarta, dan situasi keamanan semakin mengawat karena kedatangan tentara Sekutu, Pemerintah RI hijrah ke luar kota Jakarta. Dengan tanpa ragu-ragu, Sri Sultan HB IX mengulurkan tangan untuk mempersilakan Pemerintah Pusat hijrah ke kota Yogyakarta.

Atas dasar beberapa pertimbangan terutama keamanan, 4 Januari 1946, Presiden dan Wakil Presiden RI hijrah ke Yogyakarta. Sejak itu dimulailah periode Republik Jogja. Peranan yang dimainkan maupun suara yang dikumandangkan Kota Yogyakarta, mulai diperhatikan dan diperhitungkan dunia. Sehingga Belanda menyerbunya.

Dengan berbagai pertimbangan, TNI tidak melakukan perlawanan besar-besaran sehingga Belanda berhasil mencapai istana presiden. Sebelum ditawan Belanda, Presiden Soekarno memberi-

kan semangat juang kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa kemerdekaan yang telah kita proklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan telah meresap pada jiwa kita, mustahil dapat ditindas dengan kekerasan.

Reaksi dunia atas penyerangan Belanda terhadap Republik Jogja luar biasa. Dunia marah. Wakil Amerika di PBB minta supaya Dewan Keamanan mengadakan sidang darurat dan mengeluarkan resolusi agar segera diadakan gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan mereka.

Belanda tidak mau menjalankan resolusi tersebut. KTN melaporkan, Belanda terus menjalankan penyerbuan ke wilayah RI. Karena itu Dewan Keamanan bertindak lagi terutama setelah adanya Konferensi Inter Asia tentang Indonesia yang disponsori Nehru. Dengan dijiwai keputusan konferensi, tanggal 28 Januari 1949 DK PBB mengeluarkan resolusi agar Belanda dan RI mengadakan gencatan senjata, mengembalikan pemimpin-pemimpin RI dan perundingan. Belanda menentang resolusi dan menolak untuk mengembalikan RI ke residensi Yogyakarta. Alasan Belanda, RI sudah tidak ada, sudah dihapus.

Rapat Rahasia

Penolakan Belanda mendengar Sri Sultan HB IX yang segera mengadakan rapat rahasia dengan Komandan SW III, Letkol Soeharto di Kraton Yogyakarta. Rapat memutuskan untuk melakukan serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Hasilnya? Indonesia

berhasil menunjukkan bahwa Pemerintah RI masih ada. 29 Juni 1949 Belanda meninggalkan Yogyakarta dan mengembalikan para pemimpin RI

Ketika Belanda sedang mengosongkan Yogyakarta, para prajurit dan pejuang RI berkesempatan bertemu keluarga. Hari-hari itu merupakan hari keluarga, yang kemudian dijadikan Hari Keluarga Nasional (Harganas). Karena itu peristiwa Jogja Kembali merupakan lonceng berakhirnya perang kemerdekaan dan sekaligus berkumpulnya kembali keluarga yang terpisah karena perang.

Kita bersyukur, pemimpin bangsa mempunyai perhatian besar kepada eksistensi keluarga. Keluarga merupakan komunitas terkecil dalam masyarakat yang sekaligus menjadi pondamen bangsa yang utama. Adalah menjadi harapan kita, semoga peringatan Jogja Kembali dapat semakin menggugah upaya perwujudan keluarga yang benar-benar bahagia dan sejahtera, kini dan di masa mendatang. □

*) **Drs A Kardiayat Wiharyanto MM**,
Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Pojok KR

Menag desak Saudi Arabia kuota haji ditambah.
--Kualitas pelayanan juga ditingkatkan.

Ketua KPK dimintai keterangan penggunaan heli mewah.
-- Mungkin yang bersangkutan tak anggap mewah.

Zona Covid-19 ditentukan skala kota, bukan antarkecamatan.

-- Semua zona mestinya tetap diwaspadai.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-PB Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Muzzahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkryk23@yahoo.com, iklankrkryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat' Minggu..Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) .Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYoga - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Isahq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumogong Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiantoro SPd. Kepala Biro : Driyanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.